

# Kajian demokrasi di Indonesia: Media sosial sebagai ruang partisipasi generasi Z

**Khulafatul Anshor**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [Khulafatul23@gmail.com](mailto:Khulafatul23@gmail.com)

## Kata Kunci:

Demokrasi; media sosial; generasi z; partisipasi politik; identitas nasional

## Keywords :

Democracy; social media; generation z; political participation; national identity; digital literacy

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital secara nyata telah merombak pola keterlibatan politik warga negara di Indonesia, terutama pada kelompok Generasi Z yang lahir dalam rentang 1997 hingga 2012. Platform media sosial kini menempati posisi sentral sebagai arena ekspresi politik, konstruksi identitas kewarganegaraan, dan wadah keterlibatan demokratis generasi muda. Kajian ini menelisik fungsi media sosial sebagai ruang partisipasi demokrasi Generasi Z dalam konteks perpolitikan Indonesia, dengan menggunakan metode kajian literatur kualitatif yang mensintesis sepuluh sumber ilmiah terpilih. Referensi utama meliputi Suciati dan Nuqul (2024), Slamet dkk. (2009), serta Faslah (2024), yang masing-masing membahas identitas politik,

hambatan e-demokrasi, dan kedaulatan nasional. Analisis mengungkap bahwa media sosial beroperasi secara paradoksal memperluas akses partisipasi politik sekaligus memunculkan risiko polarisasi, disinformasi, dan tekanan digital. Kajian menyimpulkan bahwa partisipasi demokrasi Generasi Z yang berkualitas membutuhkan sinergi antara literasi digital, kebijakan e-demokrasi yang memadai, dan identitas nasional sebagai kompas moral.

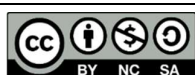
## ABSTRACT

Digital technology has transformed political participation in Indonesia, particularly among Generation Z (born 1997–2012). Social media has evolved into the primary public space for political expression, civic identity, and democratic engagement among young citizens. This study explores how social media functions as a democratic participation space for Generation Z within the Indonesian political context, employing a qualitative literature review methodology synthesizing ten scholarly sources. Core references include Suciati and Nuqul (2024) on political identity formation via social media; Slamet et al. (2009) on structural barriers to e-democracy in Indonesia; and Faslah (2024) on national identity as a foundation for sovereignty. Supporting sources address Gen Z political participation, Pancasila-based democratic strengthening, digital politics, and civic engagement. Findings reveal that social media operates dually expanding youth political access while simultaneously generating polarization, disinformation, and digital harassment risks. The study concludes that meaningful democratic participation among Generation Z requires the convergence of digital literacy, sound e-democracy policy, and a strong national identity as a moral compass.

## Pendahuluan

### Transformasi Demokrasi di Era Digital

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan wajah baru bagi praktik berdemokrasi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Cara-cara



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lama dalam berpolitik yang selama ini hanya bisa dilakukan melalui pemilu, rapat warga, atau perwakilan yang dipilih kini mengalami pergeseran signifikan seiring tumbuhnya ekosistem digital yang masif. Partisipasi warga negara tidak lagi terbelenggu oleh batas-batas ruang dan waktu, melainkan dapat berlangsung secara real-time dari mana saja melalui genggaman smartphone (Slamet et al., 2009).

Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi terbesar keempat di dunia, menjadi salah satu panggung paling dinamis dari transformasi ini. Sejak orde baru runtuh pada 1998 dan pintu reformasi terbuka, bangsa ini terus meniti jalan demokratisasi yang penuh dinamika. Kini, tantangan sekaligus peluang baru hadir dalam wujud ekosistem digital yang terus berkembang. Platform media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik baru tempat opini terbentuk, isu diperdebatkan, dan kebijakan publik dipengaruhi (Zahira et al., 2025)

### **Generasi Z sebagai Aktor Politik Baru**

Di antara berbagai kelompok demografis yang merespons transformasi digital ini, Generasi Z mereka yang menjalani masa tumbuh kembang di antara rentang kelahiran 1997 hingga 2012 menempati posisi yang paling khas sekaligus paling strategis. Tidak seperti generasi sebelumnya yang mengalami transisi dari dunia analog ke digital, Generasi Z memang lahir dan dibesarkan di tengah denyut teknologi informasi. Bagi mereka, media sosial bukan sekadar alat; ia adalah infrastruktur kehidupan sosial, budaya, dan kini juga politik (Zahira et al., 2025)

Riset yang dipaparkan oleh Harsono dalam kajiannya terhadap 142 mahasiswa Generasi Z di Kota Malang memberi gambaran yang cukup mengejutkan: tingkat antusiasme kelompok ini dalam partisipasi politik mencapai angka 67,8 persen. Temuan ini secara tegas membantah anggapan yang kerap menempatkan Generasi Z sebagai generasi yang cuek dan apatis terhadap urusan politik. Justru sebaliknya, mereka berpartisipasi dengan penuh semangat, namun melalui kanal-kanal yang sama sekali berbeda dari cara generasi pendahulunya (Harsono, n.d.)

### **Peran Ganda Media Sosial dalam Politik**

Keterlibatan media sosial dalam arena politik sejatinya menyimpan kompleksitas yang tidak bisa disederhanakan. Kajian sistematis yang dilakukan Suciati dan Nuqul menemukan bahwa platform digital menjalankan fungsi yang paradoksal dalam kehidupan berpolitik: di satu sisi ia menjadi katalis pemberdayaan yang memungkinkan siapa pun termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari pusat kekuasaan untuk membangun narasi politiknya sendiri dan meluaskan jaringan pendukung. Di sisi lain, platform yang sama dapat pula menjadi sumber tekanan yang tidak kecil (Suciati et al., 2024)

Data dari Paranita dkk. memperlihatkan bahwa dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, sebesar 92,1 persen responden Generasi Z mengakui bahwa konten media sosial berperan langsung dalam meningkatkan keterlibatan mereka pada proses elektoral, dengan Instagram dan TikTok sebagai platform terdepan (Paranita et al., 2024). Namun demikian, Harsono mengingatkan bahwa intensifikasi politik identitas di ruang digital

justru berpotensi mendorong perilaku kontraproduktif yang mengancam kualitas diskursus demokrasi (Harsono, n.d.)

Fenomena filter bubble turut memperparah kondisi ini. Mengacu pada Eli Pariser sebagaimana dikutip Zaman, filter bubble adalah kondisi di mana algoritma media sosial membatasi jangkauan informasi yang diterima pengguna berdasarkan minat dan preferensi mereka, sehingga berpotensi memperkuat bias eksisting dan mereduksi kompleksitas isu politik menjadi sesuatu yang simpel dan sejalan dengan pandangan mereka. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kualitas partisipasi demokrasi Generasi Z yang seharusnya berlandaskan informasi yang beragam dan berimbang (Zaman, 2024)

### **Identitas Nasional dan Kedaulatan Bangsa**

Dalam cakrawala yang lebih luas, kajian ini tidak dapat dilepaskan dari diskursus tentang identitas nasional sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Faslah mengemukakan dengan tegas bahwa identitas nasional bukanlah warisan sejarah yang bersifat pasif dan simbolik semata, melainkan merupakan variabel aktif yang ikut menentukan arah geostrategi, kebijakan luar negeri, dan ketahanan kedaulatan suatu bangsa (Faslah, 2024). Dalam lanskap digital yang kian kompleks, platform media sosial menjadi arena baru di mana narasi tentang kebangsaan diperebutkan secara sengit oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam.

Kajian penguatan demokrasi melalui aktualisasi nilai yang diterbitkan di lingkungan UIN Malang menegaskan bahwa fondasi Pancasila menyimpan potensi sebagai antibodi ideologis terhadap ancaman polarisasi yang kian menguat di ruang digital (Aziz, 2025). Sementara itu, Slamet dkk. mengingatkan bahwa keberhasilan e-demokrasi bukan semata soal kecanggihan teknologi, melainkan soal kesiapan kultural dan kelembagaan seluruh pemangku kepentingan (Slamet et al., 2009).

## **Pembahasan**

### **Media Sosial sebagai Arena Demokrasi Digital Generasi Z**

Memaknai peran media sosial dalam demokrasi Indonesia menuntut kita untuk terlebih dahulu memahami konsep e-demokrasi secara proporsional. E-demokrasi pada hakikatnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi secara terencana untuk memperkuat mekanisme dan struktur demokrasi suatu negara, bukan sekadar pemindahan proses-proses konvensional ke platform digital (Slamet et al., 2009). Dalam kerangka ini, media sosial menempati posisi yang unik dan strategis: bukan hanya sebagai kanal penyebaran informasi, melainkan sebagai ekosistem interaktif tempat opini publik terbentuk dan dikristalkan menjadi tindakan politik yang nyata.

Berliana Renata dalam kajian khususnya menegaskan bahwa Generasi Z tidak sekadar bersuara di platform digital, melainkan secara aktif mengorganisir protes, menggalang dukungan untuk kandidat pemilu, dan mengadvokasi isu-isu strategis seperti perubahan iklim dan keadilan sosial (Zahira et al., 2025). Bentuk aktivisme semacam ini mencerminkan partisipasi demokrasi yang jauh melampaui sekadar penggunaan hak pilih dalam bilik suara.

Data empiris dari Paranita dkk. semakin memperkuat tesis ini: sebanyak 92,1 persen responden Generasi Z dalam riset Pilpres 2024 mengakui bahwa konten media sosial secara langsung memengaruhi tingkat keterlibatan politik mereka (Paranita et al., 2024). Sementara itu, Saud dkk. menggambarkan transformasi ini sebagai demokratisasi akses politik saluran yang dulu hanya terbuka bagi kelompok elit kini bisa dinikmati oleh siapa pun yang memiliki koneksi internet (Saud et al., 2020). Sekretariat Negara RI pun menegaskan bahwa revolusi digital ini memungkinkan generasi muda menjalankan fungsi-fungsi kewarganegaraan aktif tanpa dibatasi kendala geografis maupun temporal.

### **Fungsi Ganda Media Sosial: Antara Pemberdayaan dan Risiko**

Alih-alih menempatkan media sosial dalam kategori yang sepenuhnya positif atau negatif, Suciati dan Nuqul menawarkan perspektif yang lebih bernuansa: platform digital beroperasi secara paradoksal dalam kehidupan politik (Suciati et al., 2024). Sebagai kekuatan pemberdaya, media sosial memberi akses kepada individu termasuk kelompok yang secara tradisional terpinggirkan untuk membangun narasi politik mereka sendiri, memperluas basis dukungan, dan mengakumulasi modal sosial yang signifikan. Self-efficacy politik, yakni keyakinan seseorang akan kemampuannya berkontribusi dalam proses demokrasi, dapat meningkat secara substansial melalui pengalaman berpartisipasi aktif di ruang digital.

Pada sisi yang berlawanan, tekanan yang ditimbulkan media sosial pun tidak kecil. Suciati dan Nuqul mendokumentasikan bahwa mereka yang aktif berpolitik di platform digital menghadapi risiko serangan siber, ujaran kebencian, dan stereotip negatif yang secara sistematis dapat melemahkan kepercayaan diri dan kemauan untuk terus berpartisipasi (Suciati et al., 2024). Temuan ini relevan tidak hanya bagi perempuan sebagai fokus riset tersebut, melainkan berlaku pula bagi seluruh pengguna media sosial yang aktif berpolitik, termasuk Generasi Z secara keseluruhan.

Harsono menambahkan dimensi analitis krusial: terdapat hubungan yang signifikan antara tingginya intensitas politik identitas seseorang dengan kecenderungannya terlibat dalam perilaku kontraproduktif di media sosial—dari pelanggaran privasi hingga penyebaran konten kontroversial yang berpotensi memicu perpecahan (Harsono, n.d.). Paradoks ini berkorelasi erat dengan temuan Slamet dkk. bahwa faktor non-teknologis jauh lebih menentukan keberhasilan e-demokrasi dibanding infrastruktur teknologi itu sendiri (Slamet et al., 2009).

Kajian civic engagement Generasi Z menawarkan solusi pedagogis yang menjanjikan: integrasi media sosial dalam pendidikan kewarganegaraan yang aktif dan kontekstual terbukti mampu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus keterlibatan yang bertanggung jawab (Aziz, 2025). Pendekatan ini menempatkan ruang kelas sebagai laboratorium demokrasi digital yang sesungguhnya.

### **Identitas Nasional sebagai Fondasi Demokrasi Digital**

Salah satu kontribusi konseptual terpenting kajian ini adalah memposisikan identitas nasional bukan sebagai variabel kontekstual semata, melainkan sebagai fondasi substantif yang menopang keseluruhan bangunan demokrasi digital. Faslah

berargumen bahwa identitas nasional yang terbentuk dari sintesis nilai budaya, sejarah bersama, dan cita-cita kolektif merupakan penentu arah geostrategi dan ketahanan kedaulatan yang tidak dapat dikesampingkan (Faslah, 2024) Dalam konteks digital, identitas ini menjadi jangkar moral yang memandu warga negara dalam bernavigasi di tengah banjir informasi dan tekanan ideologis dari berbagai penjuru.

Kajian identitas nasional di era globalisasi yang diterbitkan di lingkungan UIN Malang memperkaya perspektif ini: globalisasi digital menghadirkan paradoks menarik di mana ancaman terhadap nilai-nilai lokal dan peluang untuk memperkuat serta menyebarkan identitas nasional secara lebih efektif hadir secara bersamaan. Kuncinya terletak pada kesiapan generasi muda dalam memilah konten digital yang konstruktif dari yang destruktif.

Kajian penguatan demokrasi melalui aktualisasi nilai mengusulkan kerangka tiga dimensi: dimensi nilai melalui penguatan fondasi ideologis berbasis Pancasila, dimensi kelembagaan melalui reformasi institusi menuju transparansi, dan dimensi struktural melalui kebijakan yang menjamin keadilan digital. Faslah menambahkan bahwa tantangan kontemporer seperti tekanan ekonomi global dan penetrasi ideologi asing melalui platform digital merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan bangsa yang harus diantisipasi dengan serius (Faslah, 2024.)

### **Peluang Strategis dan Tantangan Struktural**

Pemetaan dari seluruh referensi yang dikaji menghasilkan gambaran yang cukup komprehensif. Dari sisi peluang, setidaknya empat hal layak digarisbawahi. Pertama, daya jangkauan media sosial yang melampaui batas geografis membuka kemungkinan bagi aspirasi dari pelosok terpencil untuk hadir dalam diskursus nasional (Slamet et al., 2009) Kedua, kecepatan sirkulasi informasi digital memungkinkan respons kolektif yang cepat terhadap isu-isu publik mendesak Ketiga, interaktivitas platform mendorong komunikasi dua arah antara warga dan penyelenggara kekuasaan. Keempat, kemampuan mobilisasi komunitas berbasis nilai memungkinkan gerakan sipil yang terorganisir secara horizontal (Zahira et al., 2025)

Namun, tantangan yang menghadang pun tidak kalah berat. Slamet dkk. mengidentifikasi kesenjangan digital sebagai hambatan fundamental yang mengancam inklusivitas e-demokrasi; budaya birokrasi yang resistif terhadap transparansi pun masih menjadi tembok yang kokoh (Slamet et al., 2009). Harsono menambahkan dimensi ancaman kontemporer berupa eskalasi politik identitas yang dapat mengubah partisipasi digital dari kekuatan pemersatu menjadi mekanisme perpecahan (Harsono, n.d.). Saud dkk. pun menegaskan bahwa efektivitas partisipasi digital pada akhirnya sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya (Saud et al., 2020)

### **Implikasi Kebijakan dan Pendidikan**

Temuan kajian ini membawa sejumlah implikasi relevan. Dalam dimensi kebijakan, pemerintah perlu merancang regulasi media sosial yang menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan pencegahan disinformasi dan ujaran kebencian. Tanpa

kehendak politik yang kuat dari pimpinan pemerintahan, seluruh agenda e-demokrasi hanya akan berhenti pada tataran wacana (Slamet et al., 2009)

Dalam dimensi pendidikan, kajian Aziz merekomendasikan agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan aspek normatif, tetapi juga membekali peserta didik dengan kecakapan praktis untuk berpartisipasi secara kritis dalam demokrasi digital (Aziz, 2025). Integrasi proyek berbasis media sosial dalam pembelajaran dapat menjadi jembatan yang menghubungkan teori demokrasi dengan praktik kewarganegaraan kontemporer. Zaman secara lebih spesifik menegaskan bahwa edukasi literasi media dan digital harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Generasi muda perlu diberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan evaluatif dalam menghadapi konten politik di media sosial, serta membangun komunitas online yang sehat dan beradab. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan lembaga pendidikan juga penting untuk mengatasi penyebaran hoaks dan konten politik yang merugikan (Zaman, 2024). Faslah mengingatkan bahwa pada akhirnya kualitas demokrasi sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas identitas nasional yang dihayati warga negaranya (Fa)

## Kesimpulan dan Saran

Pertama, media sosial telah mengukuhkan dirinya sebagai ruang demokrasi digital yang vital bagi Generasi Z Indonesia. Antusiasme politik sebesar 67,8 persen (Harsono, n.d.) dan pengakuan 92,1 persen Generasi Z terhadap pengaruh media sosial dalam keterlibatan elektoral (Paranita et al., 2024) menegaskan bahwa kelompok ini adalah aktor demokrasi yang aktif bukan generasi yang pasif secara politik.

Kedua, efektivitas media sosial sebagai wahana demokrasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kualitas literasi digital penggunanya. Dualisme fungsi yang didokumentasikan Suciati dan Nuqul, dikombinasikan dengan peringatan Slamet dkk. tentang dominannya faktor non-teknologis dalam e-demokrasi, memperjelas bahwa teknologi hanyalah katalis bukan penentu tunggal kualitas demokrasi.

Ketiga, identitas nasional yang kokoh merupakan fondasi yang tidak tergantikan dalam memastikan partisipasi demokrasi digital yang berkualitas. Faslah menegaskan sentralitas identitas nasional dalam membentuk ketahanan kedaulatan bangsa sementara kajian penguatan demokrasi melalui aktualisasi nilai menunjukkan bahwa Pancasila dapat menjadi penyeimbang ideologis di tengah gejolak demokrasi digital.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan: diperlukan regulasi media sosial yang komprehensif dan berimbang, didukung kehendak politik yang kuat (Slamet et al., 2009), yang mencakup mekanisme efektif untuk mengatasi disinformasi dan penyalahgunaan platform digital.

Bagi institusi pendidikan: rekonstruksi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan literasi digital secara substantif menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan berbasis pengalaman dan proyek nyata yang menghubungkan nilai kebangsaan dengan praktik demokrasi digital sangat direkomendasikan.

Bagi Generasi Z: peningkatan literasi digital yang melampaui kecakapan teknis menuju kesadaran kritis dan etis merupakan investasi jangka panjang yang tak ternilai. Menjadi pengguna media sosial yang bijak adalah prasyarat menjadi warga negara digital yang efektif.

kajian ini memiliki keterbatasan inheren sebagai penelitian berbasis literatur. Penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed-method dan sampel Generasi Z yang lebih representatif dari berbagai latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi sangat diperlukan untuk menghasilkan peta yang lebih akurat tentang partisipasi demokrasi digital di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aziz, A. R. (2025). Penguatan demokrasi indonesia melalui aktualisasi nilai- nilai pancasila. 3, 320–327.
- Faslah, R. (2024). identitas nasional geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. Retrieved <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Harsono, H. (2023). Analisis Model Struktural Pada Generasi Z Di Kota Malang. 166–187. Retrieved <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.752>
- Paranita, S., Rahmawati, D., & Nurdayani, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Generasi Z pada Pemilihan Presiden 2024. 6, 168–180. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/cessj/article/view/5909>
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ahmad, R., & Ashfaq, A. (2020). Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia. 8(1), 87–97. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Slamet, Abdul, R., & Aziz, D. (2009). E-demokrasi di indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis 1,2&3. 2009(semnasIF), 85–93. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/3/10741.pdf>
- Suciati, H, & Nuqul (2024). The Role of Social Media in Building Women ' s Political Identity : Its Impact on Self-Efficacy and Political Participation Peran Media Sosial Dalam Membangun Identitas Politik Perempuan : Dampaknya Terhadap Self-Efficacy Dan Partisipasi Politik. 53–63. <http://repository.uin-malang.ac.id/24664/>
- Zahira, D., Renata, B., & Aulia, R. F. (2025). Partisipasi Politik Gen Z dalam Demokrasi. 3, 232–242. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/12752>
- Zaman, S. (2024). Edukasi Literasi Politik dan Media untuk Generasi Muda : Kesiapan Menghadapi Tahun Politik 2024. Research Resipitory Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/14993/1/14993.pdf>